

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJ-IP)
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN ANGGARAN 2021**



**DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya jualah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 ini telah selesai disusun.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan kinerja juga merupakan komponen dari prinsip "good governance" yang menjadi persyaratan bagi setiap instansi, dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi

LKjIP Tahun 2021 Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang memuat informasi tentang pencapaian kinerja selama 1 (satu) tahun pelaksanaan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Pangkajene Sidenreng, 10 Januari 2022

Kepala Dinas,



I. SEMUEL K

Rangkat : Pembina Tk I

Nip. 19640317 199510 1 002



Scanned with
CamScanner

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Struktur Organisasi dan Kelembagaan	2
D. Sumber Daya OPD	5
E. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Perencanaan Strategis.....	8
B. Perjanjian Kinerja.....	10
C. Indikator Kinerja Utama	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	12
B. Realisasi Anggaran.....	19
BAB IV PENUTUP	21
A. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja.....	21
B. Langkah-langkah Peningkatan Kinerja.....	21
LAMPIRAN	

1

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah di daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di sektor Peternakan dan Perikanan.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Peternakan dan Perikanan disesuaikan dengan sistem Manajemen Pemerintahan yang berpedoman pada asas akuntabilitas dan transparan dimana setiap penyelenggaraan negara wajib untuk mempertanggungjawabkan kinerja atau hasil-hasil pelaksanaan program/ kegiatan atas penggunaan dana dan kewenangan yang diberikan. Sebagai contoh, laporan keuangan tidak hanya sebatas mengukur seberapa besar radiasinya, tetapi juga seberapa besar dana bisa mendorong peningkatan kinerja yang dicapai dalam kurung waktu tertentu.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2020 yang merupakan bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran.

B. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan LKjIP Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Struktur Organisasi dan Kelembagaan

Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Kewenangan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang berdasar atas:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang.

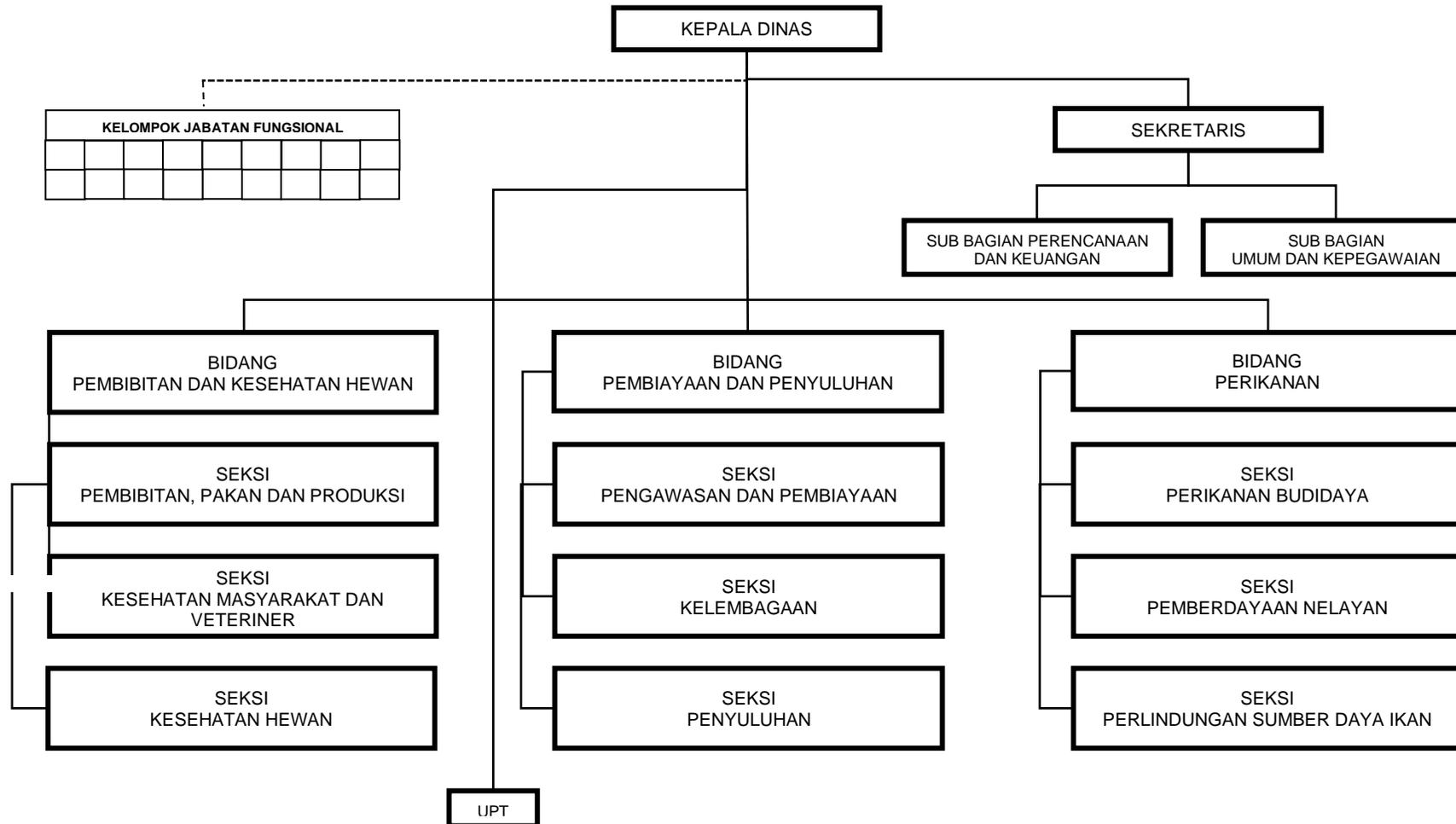
Susunan, Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Susunan Organisasi Dinas

Susunan organisasi dinas terdiri atas:

- a.** Kepala Dinas;
- b.** Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c.** Bidang Pembibitan dan Kesehatan Hewan:
 - 1) Seksi Pembibitan, Pakan dan Produksi;
 - 2) Seksi Kesehatan Masyarakat dan Veteriner;
 - 3) Seksi Kesehatan Hewan.
- d.** Bidang Perikanan:
 - 1) Seksi Pemberdayaan Nelayan;
 - 2) Seksi Perikanan Budidaya;
 - 3) Seksi Perlindungan Sumber Daya Ikan.
- e.** Bidang Pembiayaan dan Penyuluhan:
 - 1) Seksi Kelembagaan;
 - 2) Seksi Pengawasan dan Pembiayaan;
 - 3) Seksi Penyuluhan.
- f.** Jabatan Fungsional.
- g.** UPTDinas

Gambar 1. Bagan Struktur Dinas Peternakan dan Perikanan



D. Sumber Daya OPD

Salah satu instrument penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompetensi. Hingga 31 Desember 2021, Jumlah pegawai pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 80 (Delapan Puluh) Orang. Rincian atau komposisi pegawai berdasarkan golongan dan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Rekapitulasi Jumlah Pegawai ASN Menurut Golongan

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN				JUMLAH
		IV	III	II	I	
1	Kepala Dinas	1				1
2	Sekretariat	2	3	4	0	9
3	Bidang Pembibitan, Produksi dan Kesehatan Hewan	2	4	0	0	6
4	Bidang Pembiayaan dan Penyuluhan	2	3	0	0	5
5	Bidang Perikanan	1	6	0	0	7
6	UPT TPI	0	3	0	0	3
7	UPT BBI	0	5	2	0	7
8	Jabatan Fungsional	20	18			38
9	PPK		4			4
JUMLAH						80

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disnakkab Tahun 2021

Tabel 1.2. Rekapitulasi Jumlah Pegawai ASN Dinas Peternakan dan Perikanan Berdasarkan Pendidikan

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
1.	S2	14
2.	S1	59
3.	Diploma	0
4.	SLTA Sederajat	10
T O T A L		83

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disnakkab Tahun 2021

Berikut disajikan pula tabel kebutuhan pegawai berdasarkan analisa jabatan yang diterjemahkan dalam kebutuhan pegawai seperti di bawahini:

Tabel 1.3. Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Analisa Jabatan

Bagian/Bidang	Kebutuhan	Eksisting	Kekurangan
Sekretariat	14	10	4
Bidang Pembibitan, Produksi dan Kesehatan Hewan	16	11	5
Bidang Perikanan	13	7	6
Bidang Pembiayaan dan Penyuluhan	13	5	8
Fungsional	54	38	16
JUMLAH	59	40	19

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disnakkam Tahun 2021

Pada tabel komposisi Pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan, kebutuhan pegawai berdasarkan analisa jabatan, terlihat bahwa jumlah ketersediaan SDM masih jauh dari kebutuhan pegawai sehingga beban pekerjaan tidak seimbang dengan jumlah SDM yang tersedia.

Tabel 1.4. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Non PNS di Lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Pramubakti	30
2.	Petugas IB	15
3.	Sosial UPT BBI	29
4.	Sosial BPP	3
5.	Operator Simda	1
6.	Operator SIPPD	1
7.	Cleaning Service	2
8.	Penjaga Kantor	1
9.	Petugas Penata Halaman	1
10.	Petugas Kebersihan Poskeswan	1
	Jumlah	84

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disnakkam Tahun 2021

E. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Penentuan Visi dan Misi suatu organisasi sangat ditentukan oleh identifikasi isu-isu strategis. Isu strategis merupakan isu yang menjadi masalah bersama, mempunyai pengaruh secara luas terhadap pencapaian tujuan Perangkat Daerah.

Isu strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Peternakan dan Perikanan.

Berdasarkan permasalahan dan hasil telaahan yang telah dilakukan maka isu-isu untuk Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang mencakup aspek seperti 1) perubahan iklim dan kerusakan lingkungan; 2) peningkatan produktivitas dan daya saing produk sumberdaya alam yang berkelanjutan; 3) ketersediaan infrastruktur, dan sarana produksi peternakan dan perikanan; 4) kelembagaan peternak, pembudidaya dan penyuluh; 5) kepemilikan dan alih fungsi lahan; 6) akses peternak dan pembudidaya terhadap permodalan; 7) perbaikan citra peternak dan pembudidaya agar kembali diminati generasi penerus; 8) ketahanan pangan masyarakat.

2

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perumusan rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh pemerintah agar mampu menjawab setiap tuntutan lingkungan baik lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Rencana strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 memuat tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, program pembangunan daerah, program prioritas dan kegiatan dengan berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati Sidenreng Rappang.

1. Visi

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu:

“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agrobisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera”

2. Misi

Misi merupakan cara untuk mencapai Visi dan pernyataan yang menetapkan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Misi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018- 2023 termasuk ke dalam Misi ke 2 dari 7 Misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu :

“Memajukan Usaha Agribisnis, UMKM dan Industri Pengolahan Untuk Kesejahteraan Masyarakat”

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Dinas Peternakan dan Perikanan dan memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai.

Pernyataan tujuan akan diterjemahkan mejadi sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah beserta Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 - 2023 disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Sidenreng Rappang

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Target 2021
1.	Meningkatkan produktivitas sub sektor Peternakan		Laju Pertumbuhan PDRB Subsektor Peternakan (%)	0
		Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sub sektor peternakan	Kontribusi peternakan terhadap PDRB (%)	5,62
		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai SAKIP	70 (BB)
	Meningkatkan produktivitas sub sektor Perikanan		Laju Pertumbuhan PDRB Subsektor Perikanan (%)	86,15
		Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan	Kontribusi perikanan terhadap PDRB (%)	1,21

4. Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah berisikan perencanaan program dan kegiatan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi sehingga dapat mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sedangkan kebijakan merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sub sektor peternakan	Meningkatkan daya saing produk peternakan dan perikanan secara beriringan dengan penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha serta pemenuhan sarana dan prasarana peternakan dan perikanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemenuhan sarana prasarana produksi peternakan dan perikanan2. Penguatan kelembagaan pelaku usaha peternakan dan perikanan3. Penguatan daya saing produk berbasis inovasi pada proses agroindustri

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk

- meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
 4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
 5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penyusunan Perjanjian Kinerja 2021 dilakukan dengan mengacu kepada Renstra, Renja 2021, IKU dan APBD. Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2021 beserta dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sub sektor Peternakan	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB	5,62 %
2.	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sub sektor Perikanan	Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB	1,21 %

C. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Peternakan dan Perikanan memberikan pedoman bagi perumusan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, Menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis. Keterkaitan sasaran strategis dengan masing-masing indikator kinerja utama tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI
1	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sub sektor Peternakan	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB	$\text{PDRB Peternakan} = \frac{\text{Jumlah PDRB Peternakan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$
2	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sub sektor Perikanan	Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB	$\text{PDRB Perikanan} = \frac{\text{Jumlah PDRB Perikanan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$

3

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban setiap instansi untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun setiap tahunnya.

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang selaku pengemban amanah masyarakat kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Penyusunan LKJIP didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan yang telah ditetapkan. Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan indikator sasaran yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditentukan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target/rencana dan realisasi yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, yaitu dengan menggunakan rumus :

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja
1.	91 ≤	Sangat Tinggi
2.	76 ≤ 90%	Tinggi
3.	66 ≤ 75%	Sedang
4.	51 ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri No. 56 Tahun 2017

Adapun target dan capaian kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Target dan Capaian Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian (%)
Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sub sektor peternakan	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB	%	5,62	4,19	74,55
Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan	Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB	%	1,21	1,21	100

* Data merupakan angka sementara

Pada Tabel 3.2, terlihat bahwa 1 indikator memenuhi predikat kinerja sangat tinggi , dan 1 Indikator yang memenuhi predikat kinerja sedang . Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis.

Pada tahun anggaran 2021, Dinas Peternakan dan Perikanan telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Keberhasilan sasaran strategis diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu kontribusi sub sektor Peternakan terhadap PDRB dan kontribusi sub sektor Perikanan terhadap PDRB.

Analisis pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

a. **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

Tabel 3.3 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor peternakan	Kontribusi peternakan terhadap PDRB	%	5,62	4,19	74,55
Meningkatnya Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan	Kontribusi perikanan terhadap PDRB (%)	%	1,21	1,21	100
Rata-rata Capaian (%)					87,275

*Data merupakan angka sementara

Berdasarkan Tabel 3.3, terlihat bahwa data sementara realisasi kinerja pada sasaran **Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Peternakan** mencapai 4,19% atau hanya sebesar 74,55 % dari target yang telah ditentukan sedangkan untuk sasaran **Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perikanan**, realisasi mencapai 1,21% atau mencapai 100 persen dari target yang telah ditentukan dengan rata-rata capaian sebesar 87,275%.

Sumber data realisasi kinerja berasal dari hasil perhitungan PDRB yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk data tahun 2021, masih merupakan data sementara karena Badan Pusat Statistik belum merilis data PDRB untuk kedua sasaran strategis di atas.

Nilai PDRB digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun atau menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah.

b. **Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Realisasi tahun 2021 tidak terlepas dari capaian pada tahun sebelumnya. Adanya perbandingan antara capaian pada tahun 2021 dan tahun sebelumnya dimaksudkan untuk melihat pertumbuhan capaian dari tahun sebelumnya

Tabel 3.4. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja		Capaian (%)		
		2019	2020	*2021
1	Kontribusi peternakan terhadap PDRB	103,64	74,55	74,55
2	Kontribusi perikanan terhadap PDRB	101,59	186,15	100
Rata-rata Capaian (%)		102,62	130,35	87,28

*Sumber Data: Data merupakan angka sementara

Pada Tabel 3.4, terlihat bahwa capaian kinerja Sasaran **Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Peternakan** pada tahun 2021 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya sedangkan untuk sasaran **Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perikanan** mengalami penurunan dari 186,15% menjadi 100% dengan rata-rata capaian sebesar 87,28%.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. Dalam hal ini, ada 3 (tiga) pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Untuk mengetahui sampai sejauh mana capaian target renstra, maka dilakukan perbandingan antara capaian kinerja Tahun 2021 dengan target akhir Renstra yakni pada tahun 2023.

Tabel 3.5. Perbandingan Target Kinerja Periode Renstra dengan Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Periode RENSTRA	Rata-rata Realisasi Tahun *Ini	Capaian (%)
Kontribusi peternakan terhadap PDRB	%	6,04	4,19	69,37
Kontribusi perikanan terhadap PDRB (%)	%	1,26	1,21	96,03
Rata-rata Capaian (%)				82,7

*Data merupakan angka sementara

Dari Tabel 3.5 dapat diketahui bahwa capaian kedua sasaran terhadap Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan belum mencapai target, utamanya pada indikator kinerja

kontribusi peternakan terhadap PDRB. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, perlu dilakukan upaya dalam rangka mendukung peningkatan produksi sub sektor Peternakan dan Perikanan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan,

Ada beberapa penyebab tidak tercapainya target indikator sasaran sebagaimana yang diharapkan, yaitu :

1. Adanya alih fungsi lahan dari padang penggembalaan ke lahan jagung, porang dan perumahan yang berakibat semakin menyempitnya padang penggembalaan
2. Berubahnya sistem pemeliharaan dari kualitas ke kuantitas
3. Terbatasnya Straw dan N2 cair untuk inseminasi buatan (hanya disuplai oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sulawesi Selatan).

Alternatif solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

1. Memprioritaskan pengembangan pembangunan peternakan yang diarahkan pada peningkatan produksi dan peningkatan pelayanan kesehatan hewan
2. Pemberian bantuan bibit ternak, pakan dan sarana peternakan kepada masyarakat
3. Pelaksanaan kegiatan vaksinasi massal pada 11 (sebelas) kecamatan
4. Peningkatan KIE Penyakit Hewan

Keberhasilan pada indikator sasaran **Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perikanan** didukung dengan adanya penyaluran bantuan dan pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan produksi perikanan. seperti penyaluran bantuan benih ikan dan pakan, pembangunan kolam percontohan dan penebaran ikan di danau (restocking)

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2021 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Peternakan** adalah sebesar Rp 789.650.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebelum perubahan anggaran, Rp 766.334.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) pada saat

refocussing dan Rp 1.611.656.000,-(Satu Milyar Enam Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) setelah perubahan anggaran. Hingga bulan Desember 2021, anggaran yang terealisasi sebesar Rp 1.447.991.325,- (Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah atau 89,84 persen.

Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi penggunaan sumberdaya, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi inefisiensi pada penggunaan sumberdaya dimana jumlah anggaran yang digunakan mencapai 89,84 persen sedangkan pencapaian kinerja hanya 74,55 persen

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2021 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perikanan** adalah sebesar Rp 1.941.970.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), Rp 1.923.968.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) pada saat refocussing dan Rp 2.226.268.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) setelah perubahan anggaran. Hingga Desember 2021, realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran ini adalah sebesar Rp 2.019.581.975,- (Dua Milyar Sembilan Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)

Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi penggunaan sumberdaya, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi efisiensi pada penggunaan sumberdaya dimana jumlah anggaran yang digunakan mencapai 90,7 persen sedangkan pencapaian kinerja sebesar 100 persen

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja,

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran **Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Peternakan**, yaitu:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, yang mencakup kegiatan :
 - a. Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman.
 - b. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain dengan sub kegiatan :

- Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
2. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, yang mencakup Kegiatan :
 - a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kab/Kota dengan sub kegiatan :
 - Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
 3. Program Perizinan usaha Pertanian, yang mencakup kegiatan :
 - a. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/pasar Hewan, Rumah Potong Hewan, dengan sub kegiatan :
 - Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan Hewan, Rumah sakit Hewan/pasar Hewan, Rumah Potong hewan.
 - Pengawasan Pelaksanaan Izin usaha Rumah Potong Hewan
 4. Program Penyuluh Pertanian, yang mencakup kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Penyuluh Pertanian, dengan sub kegiatan :
 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa.
 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran

Meningkatnya Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perikanan

adalah sebanyak 3 program, 4 kegiatan dan 6 sub kegiatan , yaitu:

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, yang mencakup kegiatan :
 - a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
 - Penjaminan Ketersediaan Saranan Usaha Perikanan Tangkap
 - b. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:
 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya yang mencakup kegiatan :
 - a. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.
 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
3. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, yang mencakup kegiatan :
- a. Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - Pengawasan Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam kabupaten/Kota.

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2021, Dinas Peternakan dan Perikanan mengelola anggaran awal sebesar Rp 10.151.385.000,-(Sepuluh Milyar Seratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pada Bulan April 2021, melalui refocussing, anggaran yang dikelola mengalami perubahan menjadi Rp 10.388.133.212,-,- (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah).

Jumlah anggaran yang dikelola kembali mengalami perubahan pada bulan Oktober 2021 melalui anggaran perubahan sebesar Rp 11.995.273.000,- (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Hingga 31 Desember 2021, jumlah anggaran yang terserap mencapai Rp 11.384.072.263,- (Sebelas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) atau 94,90 % dari total anggaran.

1. Pendapatan

Target Pendapatan Asli Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan untuk tahun 2021 sejumlah Rp 147.310.000,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari retribusi penjualan produksi usaha daerah dengan rincian sebagai berikut :

- a. BBI Passeno sebesar Rp 46.392.000,-
- b. BBI Majjelling sebesar Rp 22.756.000,-
- c. BBI Pangkajene sebesar Rp 37.481.000,-

- d. BBI Kalosi sebesar Rp 24.706.000,-
- e. Rumah Potong Hewan (RPH) sebesar Rp 15.975.000,-

Realisasi pendapatan untuk tahun anggaran 2021 sebesar Rp 148.620.000,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)) atau 100,89%.

2. Belanja

Target dan realisasi belanja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021 dengan Target belanja tahun 2021 sebesar Rp 11.995.273.000,- (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan terealisasi Rp 11.384.072.263,- (Sebelas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) atau 94,90 % dari total anggaran.

Secara umum persentase capaian belanja tidak sampai seratus persen disebabkan oleh:

- a. Besarnya persentase anggaran yang akan dicairkan pada triwulan IV sementara untuk proses pencairan harus menunggu penetapan APBD Perubahan
- b. Adanya pendapatan daerah yang diterima pada akhir tahun sehingga belanja tidak dapat dilakukan pada tahun berkenaan,

Untuk mengoptimalkan capaian kinerja keuangan untuk tahun selanjutnya maka Dinas Peternakan dan Perikanan melakukan kebijakan sebagai berikut:

- a. Sinkronisasi antara perencanaan dan keuangan sehingga dokumen perencanaan betul-betul dapat dipedomani untuk penentuan anggaran,
- b. Mengupayakan program dan kegiatan pada perangkat daerah agar direncanakan sesuai dengan indikator kinerja yang dapat diukur,

4

PENUTUP

A. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2021 termasuk dalam kategori **Tinggi**, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN	KRITERIA
1	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sub sektor peternakan	74,55	Sedang
2	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan	100	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian		87,3	Tinggi

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masih terdapat Sasaran Strategis yang belum mencapai target yang ditetapkan yaitu **“Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Peternakan”** dengan capaian sebesar 74,55%. Meskipun demikian rata-rata capaian Sasaran Strategis masih masuk dalam kriteria **Tinggi** yakni 87,3

B. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Untuk lebih meningkatkan kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun yang akan datang, maka perlu dilakukan berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala dan hambatan yang dapat berpengaruh terhadap nilai capaian indikator kinerja. Upaya-upaya yang dapat ditempuh antara lain :

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Mengoptimalkan pendayagunaan sumberdaya manusia sebagai penggerak dan pelaku pelaksanaan pembangunan
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia

4. Menkuatkan komitmen Kepala Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dan memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian reward and punishment;
5. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran jangka Dinas Peternakan dan Perikanan.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Dinas Peternakan dan Perikanan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

Pangkajene, 10 Januari 2022

Kepala Dinas,



Ir. SEMUEL K

Pangkat : Pembina Tk I

Nip. 19640317 199510 1 002



Scanned with
CamScanner

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Ir. Samuel K

J a b a t a n : Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

N a m a : H. Dollah Mando

J a b a t a n : Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, 21 Oktober 2021



Scanned with
CamScanner

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sub sektor peternakan	Kontribusi Peternakan terhadap PDRB	5,62 %
2	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan	Kontribusi Perikanan terhadap PDRB	1,21 %

Program	Anggaran	Keterangan
I. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 8.157.349.000	APBD
II. Pengelolaan Perikanan tangkap	Rp. 816.687.000	APBD/DAK
III. Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 1.262.042.000	APBD/DAK
IV. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp. 147.539.000	APBD
V. Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 1.316.511.000	APBD
VI. Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp. 175.705.000	APBD
VII. program Perizinan Usaha Pertanian	Rp. 80.894.000	APBD
VIII. Penyuluh Pertanian	Rp. 38.546.000	APBD
Jumlah	Rp 11.995.273.000	

Pangkajene Sidenreng , 21 Oktober 2021

BUPATI SIDENRENG RAPPANG



KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN



2. Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2021

LAPORAN 9 | KEMAJUAN REALISASI FISIK/KEUANGAN
PELAKSANAAN KEGIATAN DENGAN SUMBER DANA APBD TAHUN ANGGARAN 2021
KEADAAN SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER

SKPD : DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

PROGRAM/KEGIATAN	NILAI DPA (Rp)	TARGET SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER			REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER			KODETIFIKASI MASALAH	Ket.
		FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN			
		%	Rp	%	(%)	(Rp)	(%)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.157.349.000,00	100,00	8.157.349.000,00	100,00	82,95	7.916.498.963,00	97,05		
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.816.000,00	100,00	14.816.000,00	100,00	100,00	11.796.000,00	79,62		
Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.773.000,00	100,00	10.773.000,00	100,00	100,00	7.753.000,00	71,97		
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	306.000,00	100,00	306.000,00	100,00	100,00	306.000,00	100,00		
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	879.000,00	100,00	879.000,00	100,00	100,00	879.000,00	100,00		
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	834.000,00	100,00	834.000,00	100,00	100,00	834.000,00	100,00		
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1.350.000,00	100,00	1.350.000,00	100,00	100,00	1.350.000,00	100,00		
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	674.000,00	100,00	674.000,00	100,00	100,00	674.000,00	100,00		
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.649.749.000,00	100,00	7.649.749.000,00	100,00	99,50	7.583.676.583,00	99,14		
Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.648.126.000,00	100,00	7.648.126.000,00	100,00	99,00	7.582.067.583,00	99,14		
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.623.000,00	100,00	1.623.000,00	100,00	100,00	1.609.000,00	99,14		
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	206.892.000,00	100,00	206.892.000,00	100,00	65,75	120.585.550,00	58,28		
Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	1.734.000,00	100,00	1.734.000,00	100,00	100,00	1.734.000,00	100,00		
Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	102.704.000,00	100,00	102.704.000,00	100,00	31,25	26.712.000,00	26,01		
Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102.454.000,00	100,00	102.454.000,00	100,00	66,00	92.139.550,00	89,93		
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	259.657.000,00	100,00	259.657.000,00	100,00	67,50	176.335.825,00	67,91		
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	100,00	100,00	2.000.000,00	100,00		
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	48.265.000,00	100,00	48.265.000,00	100,00	100,00	41.321.825,00	85,61		
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.100.000,00	100,00	5.100.000,00	100,00	20,00	800.000,00	15,69		
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	204.292.000,00	100,00	204.292.000,00	100,00	50,00	132.214.000,00	64,72		
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.235.000,00	100,00	26.235.000,00	100,00	82,00	24.105.005,00	91,88		
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.135.000,00	100,00	14.135.000,00	100,00	80,00	12.005.005,00	84,93		
Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00	100,00	10.000.000,00	100,00		
Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	2.100.000,00	100,00	2.100.000,00	100,00	66,00	2.100.000,00	100,00		
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	816.687.000,00	100,00	816.687.000,00	100,00	94,41	788.059.200,00	96,49		

PROGRAM/KEGIATAN	NILAI DPA (Rp)	TARGET SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER		REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER			KODETIKASI MASALAH	Ket.	
		FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN			
		%	Rp	%	(%)	(Rp)			(%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Kegiatan: Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawe dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	790.803.000,00	100,00	790.803.000,00	100,00	98,82	774.876.200,00	97,99		
Sub Kegiatan: Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	75.375.000,00	100,00	75.375.000,00	100,00	97,63	73.586.300,00	97,63		
Sub Kegiatan: Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan tangkap	715.428.000,00	100,00	715.428.000,00	100,00	100,00	701.289.900,00	98,02		
Kegiatan: Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kabupaten/Kota	25.884.000,00	100,00	25.884.000,00	100,00	90,00	13.183.000,00	50,93		
Sub Kegiatan: Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	25.884.000,00	100,00	25.884.000,00	100,00	90,00	13.183.000,00	50,93		
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.262.042.000,00	100,00	1.262.042.000,00	100,00	100,00	1.085.518.775,00	86,01		
Kegiatan: Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.262.042.000,00	100,00	1.262.042.000,00	100,00	100,00	1.085.518.775,00	86,01		
Sub Kegiatan: Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) daerah Kabupaten /Kota	636.200.000,00	100,00	636.200.000,00	100,00	100,00	467.070.225,00	73,42		
Sub Kegiatan: Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	625.842.000,00	100,00	625.842.000,00	100,00	100,00	618.448.550,00	98,82		
PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	147.539.000,00	100,00	147.539.000,00	100,00	98,00	146.004.000,00	98,96		
Kegiatan: Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawe dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	147.539.000,00	100,00	147.539.000,00	100,00	98,00	146.004.000,00	98,96		
Sub Kegiatan: Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawe, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	147.539.000,00	100,00	147.539.000,00	100,00	98,00	146.004.000,00	98,96		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.316.511.000,00	100,00	1.316.511.000,00	100,00	83,86	1.269.649.825,00	96,44		
Kegiatan: Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	96.700.000,00	100,00	96.700.000,00	100,00	69,10	66.781.600,00	69,06		
Sub Kegiatan: Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	96.700.000,00	100,00	96.700.000,00	100,00	69,10	66.781.600,00	69,06		
Kegiatan: Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.219.811.000,00	100,00	1.219.811.000,00	100,00	98,61	1.202.868.225,00	98,61		
Sub Kegiatan: Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.219.811.000,00	100,00	1.219.811.000,00	100,00	98,61	1.202.868.225,00	98,61		
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	175.705.000,00	100,00	175.705.000,00	100,00	67,00	116.377.900,00	66,23		
Kegiatan: Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	175.705.000,00	100,00	175.705.000,00	100,00	67,00	116.377.900,00	66,23		
Sub Kegiatan: Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	175.705.000,00	100,00	175.705.000,00	100,00	67,00	116.377.900,00	66,23		
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	80.894.000,00	100,00	80.894.000,00	100,00	98,00	33.447.700,00	41,35		

PROGRAM/KEGIATAN	NILAI DPA (Rp)	TARGET SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER			REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER			KODETIFIKASI MASALAH	Ket.
		FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN			
		%	Rp	%	(%)	(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kegiatan: Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	80.894.000,00	100,00	80.894.000,00	100,00	98,00	33.447.700,00	41,35		
Sub Kegiatan: Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	55.523.000,00	100,00	55.523.000,00	100,00	104,00	10.307.750,00	18,56		
Sub Kegiatan: Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	25.371.000,00	100,00	25.371.000,00	100,00	92,00	23.139.950,00	91,21		
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	38.546.000,00	100,00	38.546.000,00	100,00	100,00	28.515.900,00	73,98		
Kegiatan: Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	38.546.000,00	100,00	38.546.000,00	100,00	100,00	28.515.900,00	73,98		
Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	22.380.000,00	100,00	22.380.000,00	100,00	100,00	19.994.900,00	89,34		
Sub Kegiatan: Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	16.166.000,00	100,00	16.166.000,00	100,00	100,00	8.521.000,00	52,71		
JUMLAH	11.995.273.000,00	100,00	11.995.273.000,00	100,00	90,53	11.384.072.263,00	94,90		

Pangkalene Sidenreng, 06 Januari 2022



3. Rencana Kerja Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.25.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				958.635.000				968.221.350
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Produksi Perikanan Tangkap	Kec. Tellu LimpoE, Panca Lautang, Watang Sidenreng dan Pitu Riase	100,00	495.338.000			100,00	500.291.380
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Tangkap		2.745,4	442.320.000			2.800	446.743.200

3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (unit)		2	79.000.000			2	79.790.000
3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan tangkap	Jumlah Sarana Perikanan Tangkap (Unit)		515	363.320.000			515	366.953.200
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Wilayah Pemberdayaan Nelayan Kecil		100%	53.018.000			100%	53.548.180
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Yang Mengikuti Pelatihan (orang)		40,00	53.018.000			40,00	53.548.180
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Produksi Perikanan Budidaya	11 Kecamatan	100,00	425.382.000			100,00	429.635.820
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Produksi Perikanan Budidaya		641,64	425.382.000			673,72	429.635.820
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan		11,00	210.712.000			12,00	212.819.120
		Waktu penyediaan jasa tenaga Pendukung Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		12,00				12,00	

3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan		10,00	214.670.000			10,00	216.816.700
3.25.05	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan	Kec. Tellu LimpoE, Panca Lautang, Watang Sidenreng dan Pitu Riase	70%	37.915.000			75%	38.294.150
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan		294	37.915.000			294	38.294.150
3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap		4	37.915.000			4	38.294.150
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				3.062.092.000				3.092.712.920

3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Daging	11 Kecamatan	5.127.388	1.210.757.000			5.358.011	1.222.864.570
		Jumlah Produksi Telur		80.005.124				290.000.000	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Akseptor Yang Dilayani		10%	238.755.000			10%	241.142.550
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Ternak Yang Lahir dari IB		4.216	238.755.000			4.532	241.142.550
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ternak Yang Disebar		100%	1.262.002.000			100%	1.274.622.020
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Pengadaan Benih/Bibit Ternak		2.000	1.156.197.000			2.000	1.167.758.970
3.27.02.2.06.02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota lain	Luas Kebun Hijauan Makanan Ternak yang di Tanami		1 Ha	105.805.000			1 Ha	106.863.050
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian (%)	11 Kecamatan	100%	1.198.825.000			100%	1.210.813.250

3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Cakupan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian (%)		100%	1.198.825.000			100%	1.210.813.250
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun, direhab dan dipelihara (Unit)		2	1.198.825.000			2	1.210.813.250
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	11 Kecamatan	21,00	362.510.000			21,00	366.135.100
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Penyakit Zoonosis		20%	267.510.000			20%	270.185.100
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Dosis Vaksinasi Massal (Dosis)		8.500	267.510.000			5.000	270.185.100
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pesentase Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan yang Memenuhi persyaratan Teknis Kesmavet		50%	95.000.000			75%	95.950.000

3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha hewan dan Produk Hewan yang Didampingi Untuk Memenuhi Persyaratan Kesmavet		4	95.000.000			4	95.950.000
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Penerbitan Izin Usaha Bidang Peternakan	Pangkajene Sidenreng	71,43	13.665.000			100,00	13.801.650
3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasiitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Cakupan Penerbitan Izin Usaha Bidang Peternakan		100%	13.665.000			100%	13.801.650
3.27.06.2.02.01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Perda dan Izin Usaha Peternakan Yang Diterbitkan		50	13.665.000			75	13.801.650

3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Rasio Penyuluh Peternakan Terhadap Pelaku Utama Peternakan/Kelompok Ternak	11 Kecamatan	1 : 13	67.168.000			1 : 13	67.839.380
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh		100%	67.168.000			100%	67.839.380
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Pertemuan Penyuluh		4	45.758.000			4	46.215.280
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Pelaksanaan Inventarisasi Data Kelompok Tani Ternak dan Perikanan		1	21.410.000			1	21.624.100
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkajene Sidenreng	100	7.779.779.390			100	7.857.577.185

1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran, dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah		100,00	18.548.850			100,00	18.734.339
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun		2,00	14.841.270			2,00	14.989.683
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA Yang Disusun		1,00	720.130			1,00	727.331
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Yang Disusun		1,00	422.000			1,00	426.220
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA Yang Disusun		1,00	842.340			1,00	850.763
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Yang Disusun		1,00	718.110			1,00	725.291
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD Ysng Disusun		5,00	1.005.000			5,00	1.015.050

1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100,00	7.089.649.390			100,00	7.160.545.884
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		12	7.058.525.390			12	7.129.110.644
1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang Disusun		1	31.124.000			1	31.435.240
1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	233.215.150			100	235.547.302
1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang disediakan		28	3.468.000			28	3.502.680
1.6.2	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		40	104.747.150			40	105.794.622

1.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		160	125.000.000			160	126.250.000
1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	363.766.000			100%	367.403.660
1.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Yang Bermaterai		1.200	3.000.000			1.200	3.030.000
1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik		12	84.000.000			12,00	84.840.000
1.8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12	5.000.000			12,00	5.050.000
1.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor		12	271.766.000			12,00	274.483.660

1.9	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	74.600.000			100	75.346.000
1.9.1	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas jabatan yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Secara Rutin/Berkala		8	61.000.000			8	61.610.000
1.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara		1	10.100.000			1	10.201.000
1.9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala		22	3.500.000			22	3.535.000
					11.881.339.390				12.000.152.485

4. Dokumentasi Terkait Sasaran Indikator



Gambar 1. Penyerahan Bantuan Lebah Madu



Gambar 2. Kegiatan Vaksinasi SE dan Anthrax



Gambar 3. Kegiatan Inseminasi Buatan



Gambar 4. Penyerahan Bantuan Ternak Unggas dan Pakan



Gambar 5. Restocking



Gambar 6. Pengadaan Pakan Ikan



Gambar 7. Pengadaan Calon Induk



Gambar 8. Penyerahan bantuan perahu